

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	RRI

Wilayah: BPK Jawa Tengah

## BPK Jateng Menyelenggarakan Pelantikan Pengurus IKPN Jateng Periode 2020-2023

[https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/891732/bpk-jateng-menyelenggarakan-pelantikan-pengurus-ikpn-jateng-periode-2020-2023?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/891732/bpk-jateng-menyelenggarakan-pelantikan-pengurus-ikpn-jateng-periode-2020-2023?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)



KBRN, Semarang : Menindaklanjuti terbentuknya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) pada 20 Februari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah menyelenggarakan pelantikan pengurus IKPN Jateng periode 2020-2023 secara offline dan online di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (1/9/20).

Acara pelantikan dihadiri secara langsung (offline) oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Wakil ketua Umum DPN IPKN Hery Subowo, Anggota Dewan Pengarah IPKN Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal DPN IPKN Gunarwanto, Koordinator Wilayah Tengah Ade Iwan Ruswana, Ketua IPKN Wilayah Jawa Tengah Ayub Amali, Ketua IPKN Jawa Timur Agus Joko Setyono, serta Bendahara DPN IPKN Firdaus Amyar.

Pembentukan IPKN dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Wakil Ketua Umum DPN IPKN Hery Subowo mengatakan pembentukan IPKN guna mewadahi pemeriksaan keuangan negara.

" Pembentukan pengurus IPKN di sejumlah wilayah ini gunanya untuk menggabungkan pembinaan/peningkatan kompetensi pemeriksa keuangan negara. Jadi para pemeriksa keuangan negara tidak hanya dari BPK namun juga dari APIP, Inspektorat Provinsi dan Kantor Angkutan Publik," ujar Wakil Ketua Umum DPN IPKN Hery Subowo kepada RRI sesuai pelantikan IPKN Jateng.

Menurut Hery, kolaborasi antara pemeriksa dan pengawas keuangan negara diperlukan agar dapat lebih efektif dalam memastikan uang negara dimanfaatkan secara tepat oleh pengelola keuangan negara.

" Jadi hasil pemeriksaan yang dilakukan sudah satu standar/metodologi sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan BPK untuk merencanakan pemeriksaan, pengecekan tindak lanjut serta mendalami kembali hasil pemeriksaan. Jadi tidak duplikasi dan saling memanfaatkan. Itu tujuan utama dari pembentukan asosiasi profesi supaya ada satu kesamaan metodologi dan standar," terangnya

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH